



# BNNP DIY

## LAPORAN KEUANGAN WILAYAH AUDITED

T.A 2023



Call Center BNNP DIY  
085 200 800 300



infobnn\_prov\_diyogyakarta



yogyakarta.bnn.go.id



BNNP\_DIY



BNN Provinsi DIY

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, Mei 2024  
Kepala BNNP DIY,



Andi Fairan, S.I.K., M.S.M.  
NRP 67090431

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	33
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37
VI. Lampiran dan Daftar	38

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY  
JALAN BRIGJEN KATAMSO KOMPLEK PERKANTORAN SELATAN  
PURAWISATA YOGYAKARTA  
TELEPON 0274 385378, FAXIMILE 0274 385378**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Yogyakarta, Mei 2024  
Kepala BNNP DIY,

Andi Fairan, S.I.K., M.S.M.  
NRP 67090431

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp179.003.698 atau mencapai 110 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp162.690.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp17.676.635.359 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp17.833.439.000.

### **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.958.961.467 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp238.028.576; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.684.732.891; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp36,200,000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp36.331.416 dan Rp6.922.630.051.

### **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp170.810.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp18.318.767.626 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp18.147.957.626. Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.256.302 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp18.152.213.928.

### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp7.537.618.536 ditambah Defisit-LO sebesar Rp18.152.213.928 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp17.537.225.443 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp6.922.630.051.

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi

Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CAT.	TH 2023			%	TH 2022
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)		REALISASI
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	162.690.000	179.003.698	16.313.698	110,03	104.594.049
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>		<b>162.690.000</b>	<b>179.003.698</b>	<b>16.313.698</b>	<b>110,03</b>	<b>104.594.049</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>					
Belanja Pegawai	B.3	8.147.091.000,	8.125.516.616	(21.574.384)	99,74	7.259.317.284
Belanja Barang	B.4	9.214.627.000,	9.108.284.491	(106.342.509)	98,85	8.984.570.638
Belanja Modal	B.5	471.721.000,	470.023.731	(1.697.269)	99,64	362.989.774
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>17.833.439.000</b>	<b>17.703.824.838</b>	<b>(129.614.162)</b>	<b>99,27</b>	<b>16.606.877.696</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**II. NERACA**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Persediaan	C.1	238.028.576	233.530.398
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>238.028.576</b>	<b>233.530.398</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.2	17.796.351.272	17.566.680.534
Gedung dan Bangunan	C.3	5.348.464.000	5.200.740.000
Aset Tetap Lainnya	C.4	301.843.000	301.843.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.5	-16.761.925.381	-15.778.580.492
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>6.684.732.891</b>	<b>7.290.683.042</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.6	277.638.000	277.638.000
Aset Lain-Lain	C.7	74.861.963	29.191.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.8	-316.299.963	-256.149.000
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>36.200.000</b>	<b>50.680.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>6.958.961.467</b>	<b>7.574.893.440</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.8	36.331.416	37.274.904
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>36.331.416</b>	<b>37.274.904</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.9	6.922.630.051	7.537.618.536
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>6.922.630.051</b>	<b>7.537.618.536</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>6.958.961.467</b>	<b>7.574.893.440</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**III. LAPORAN OPERASIONAL**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	170.810.000	100.050.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>170.810.000</b>	<b>100.050.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	8.098.327.137	7.259.317.284
Beban Persediaan	D.3	399.636.447	487.217.560
Beban Barang dan Jasa	D.4	5.806.966.657	5.634.146.826
Beban Pemeliharaan	D.5	950.000.650	958.412.021
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.952.299.071	2.032.505.538
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	24.000.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.111.537.664	1.320.055.987
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>18.318.767.626</b>	<b>17.715.655.216</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(18.147.957.626)</b>	<b>(17.615.605.216)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		1.661.010	2.712.886
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.661.010	4.100.000
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	1.387.114
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(5.917.312)	(29.384.651)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.532.688	444.049
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		12.450.000	29.828.700
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11	<b>(4.256.302)</b>	<b>(26.671.765)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(18.152.213.928)</b>	<b>(17.642.276.981)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa	D.12	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(18.152.213.928)</b>	<b>(17.642.276.981)</b>
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(18.152.213.928)</b>	<b>(17.642.276.981)</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	7.537.618.536	8.492.957.990
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18.152.213.928)	(17.642.276.981)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	(2.170.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	3.080.000
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	(5.250.000)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
<b>JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	17.537.225.443	16.689.107.527
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(614.988.485)	(955.339.454)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5</b>	<b>6.922.630.051</b>	<b>7.537.618.536</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis*

Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba melalui metode P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Berkantor di Jalan Brigjen Katamso, Komplek Perkantoran Selatan Purawisata Yogyakarta, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta akan bahaya penyalahgunaan Narkoba sehingga masyarakat bisa turut serta menanggulangi permasalahan tersebut.

Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY berkomitmen dengan visi “Menjadi perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu melayani seluruh masyarakat DIY, komponen masyarakat DIY, LSM dan Instansi Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.”

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat DIY terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba;
- Meningkatkan peran serta masyarakat DIY dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Meningkatkan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba di DIY dan pengurangan angka relapse (kambuh kembali);
- Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di DIY.

*Dasar Hukum*

#### A.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Ulang Aset Tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 mengenai Pemutakhiran Akun COVID-19;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor S-

791/WPB.15/2024 Tanggal 27 April 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-W) Tahun 2024 Audited.

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Kepala BNN RI Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 3 ayat 2 point c, Badan Narkotika Nasional Provinsi bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) yang menyusun laporan keuangan tingkat wilayah dengan penanggung jawab Kepala BNN Provinsi. Laporan Keuangan tingkat wilayah periode 31 Desember Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terdiri dari Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul General Ledger dan Pelaporan. SAKTI Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan tingkat wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY periode 31 Desember Tahun 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY adalah 4 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

*Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W*

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	0400	Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY	-	1	-	-	1
2	0400	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman	-	1	-	-	1
3	0400	Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta	-	1	-	-	1
4	0400	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul	-	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>			-	4	-	-	4

*Basis Akuntansi*

**A.4. Basis Akuntansi**

Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

**A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

*Pendapatan- LRA*

**(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan LO*

**(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Aset*

#### **5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:  
Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penyisihan</b>
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019. Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

#### *Piutang Jangka Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### *Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## Ekuitas

### (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

### B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.833.439.000. Selama tahun 2023, satker-satker BNN Wilayah DIY melakukan beberapa kali revisi atas DIPA Awal yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perbandingan anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan PNB</b>		
BNNP DIY	67.570.000	67.570.000
BNN Kota Yogyakarta	0	0
BNN Kabupaten Sleman	8.700.000	58.870.000
BNN Kabupaten Bantul	36.250.000	36.250.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>112.520.000</b>	<b>162.690.000</b>
<b>Belanja</b>		
BNNP DIY	12.403.004.000	12.536.414.000
BNN Kota Yogyakarta	1.659.018.000	1.679.018.000
BNN Kabupaten Sleman	1.777.075.000	1.837.211.000
BNN Kabupaten Bantul	1.643.396.000	1.780.796.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>17.482.493.000</b>	<b>17.833.439.000</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp179.003.698

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp179.003.698 atau mencapai 110 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp162.690.000. Pendapatan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari SKHPN dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023 (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	162.690.000	179.003.698	110
Pendapatan Lain-lain	0		
<b>Jumlah</b>	<b>162.690.000</b>	<b>179.003.698</b>	<b>110</b>

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	179.003.698	104.594.049	71
Pendapatan Lain-lain		0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>179.003.698</b>	<b>104.594.049</b>	<b>71</b>

Realisasi pendapatan tahun 2023 naik 71 persen dibandingkan tahun 2022 karena tahun 2023 terdapat pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.661.010 dan Adanya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp6.532.688 di BNNP DIY. Untuk pendapatan dari jasa lainnya (SKHPN) pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada Tahun 2023 pendapatan dari SKHPN mencapai Rp170.810.000 dan Rp100.494.049 pada tahun 2022.

Realisasi Belanja  
Rp17.676.635.359

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp17.676.635.359 atau 99,27% dari anggaran belanja sebesar Rp17.833.439.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.147.091.000	8.125.516.616	99,74
Belanja Barang	9.214.627.000	9.108.548.491	98,85
Belanja Modal	471.721.000	470.023.731	99,64
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>17.833.439.000</b>	<b>17.704.088.838</b>	<b>99,27</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>-</b>	<b>27.453.479</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>17.833.439.000</b>	<b>17.704.088.838</b>	<b>99,27</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,61 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

Peningkatan belanja pegawai dikarenakan oleh kenaikan anggaran dan realisasi belanja pegawai dan belanja modal. Kenaikan belanja pegawai berasal dari mutasi masuk pegawai di lingkungan BNNP wilayah DIY.

Meningkatnya Belanja Modal disebabkan adanya penambahan pengadaan laptop, printer, AC, filling cabinet dll. Dan menurunnya Belanja Barang karena *refocusing* anggaran.

### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai	8.125.516.616	7.259.317.284	89,34
Belanja Barang	9.108.584.491	8.984.570.638	98,64
Belanja Modal	470.023.731	362.989.774	77,23
<b>Jumlah</b>	<b>17.704.124.838</b>	<b>16.606.877.696</b>	<b>6,61</b>

*Belanja Pegawai*  
*Rp8.125.516.616*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.125.516.616 dan Rp7.259.317.284. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,56% persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan oleh mutasi pegawai masuk di lingkungan BNNP DIY.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.140.498.616	6.353.043.876	12,39
Belanja Uang Makan PNS	945.968.000	914.163.000	3,48
Belanja Uang Makan PPPK	39.050.000	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>8.125.516.616</b>	<b>7.267.206.876</b>	<b>11,81</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-27.189.479</b>	<b>-7.889.592</b>	<b>244,62</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.098.327.137</b>	<b>7.259.317.284</b>	<b>11,56</b>

*Belanja Barang*  
*Rp9.108.284.491*

### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.108.284.491 dan Rp8.984.570.638. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 1,38 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain Peningkatan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional	2.736.959.244	2.644.312.018	3,50
Belanja Barang Non Operasional	1.063.568.213	1.175.698.792	-9,54
Belanja Persediaan	398.074.625	344.322.008	15,61
Belanja Jasa	2.007.760.188	1.805.320.261	11,21
Belanja Pemeliharaan	949.887.150	958.412.021	-0,89
Belanja Perjalanan Dinas	1.952.299.071	2.036.405.538	-4,13
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat		24.000.000	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9.108.548.491</b>	<b>8.988.470.638</b>	<b>1,34</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	<b>264.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>-93,23</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.108.284.491</b>	<b>8.984.570.638</b>	<b>1,38</b>

Satuan kerja BNNP DIY tidak memiliki alokasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19. Alokasi anggaran COVID-19 sebesar Rp21.790.000 adalah alokasi anggaran di satuan kerja BNN Kabupaten Sleman dan BNN Kota Yogyakarta.

*Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19*

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	21.790.000	0	0%

*Belanja Modal  
Rp470.023.731*

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp470.023.731 dan Rp362.989.774. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 29,49 persen dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh pengalokasian anggaran belanja

modal yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.299.731	362.989.774	- 11,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.724.000	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>470.023.731</b>	<b>362.989.774</b>	<b>29,49</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>470.023.731</b>	<b>362.989.774</b>	<b>29,49</b>

Belanja Modal	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
BNNP DIY	184.193.800	69.245.721	2%
BNNK SLEMAN	29.027.750	69.579.000	-1%
BNNK BANTUL	183.023.000	18.000.000	9%
BNNK YOGYA	73.779.181	206.165.053	-1%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>362.989.774</b>	<b>137.799.200</b>	<b>263%</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>362.989.774</b>	<b>137.799.200</b>	<b>263%</b>

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp322.299.731*

**B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp322.299.731 mengalami penurunan sebesar 8,8 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp362.989.774. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Adapun rincian Belanja Modal dan Peralatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
1	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	-	3.000.000	-
2	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	75.395.000	10.800.000	698
3	ALAT KANTOR LAINNYA	6.468.800	17.281.000	(37,43)
4	MEUBELAIR	17.063.981	70.155.000	(24.32)
5	ALAT PEMBERSIH	3.079.200	-	-
6	ALAT PENDINGIN	12.000.000	25.350.000	(47.33)
7	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )	22.950.000	5.403.553	424
8	PERALATAN STUDIO AUDIO	2.680.000	-	-
9	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	12.938.000	13.287.000	(97.3)
10	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	-	23.559.500	-
11	PERSONAL KOMPUTER	126.563.750	163.859.723	(77.23)
12	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	43.161.000	30.293.998	142
	<b>Jumlah</b>	<b>322.299.731</b>	<b>362.989.774</b>	<b>(8,8)</b>

**PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Aset Lancar*  
Rp238.028.576

**C.1. Aset Lancar**

Jumlah Aset Lancar Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp238.028.576 dan Rp233.530.398.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Persediaan*  
Rp238.028.576

**C.1.1. Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp238.028.576 dan Rp233.530.398 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	2023	2022
Barang Konsumsi	126.630.900	131.836.490
Amunisi	111.397.676	101.693.908
Bahan Baku	-	-
Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>238.028.576</b>	<b>233.530.398</b>

Aset Tetap  
Rp6.684.732.891

**C.2. Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.684.732.891 dan Rp7.290.683.042.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya.

Peralatan dan  
Mesin  
Rp17.796.351.272

**C.2.2. Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp17.796.351.272 dan Rp17.566.680.534.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin*

*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	<b>17.566.680.534</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	371.039.781
Hibah	322.299.731
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	28.940.050
Mutasi Kurang:	(141.369.043)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(121.569.043)
Reklasifikasi Keluar	(19.800.000)
Koreksi Susulan	0
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>17.796.351.272</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(16.061.476.887)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>1.734.874.385</b>

Mutasi tambah:

Pembelian berupa:

*Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2023*

*(dalam rupiah)*

No.	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Nilai
1	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	15 unit	75.395.000
2	ALAT KANTOR LAINNYA	1 unit	6.468.800
3	MEUBELAIR	7 unit	17.063.981
4	ALAT PEMBERSIH	1 unit	3.079.200
5	ALAT PENDINGIN	2 unit	12.000.000
6	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA ( HOME USE )	1 unit	22.950.000
7	PERALATAN STUDIO AUDIO	1 unit	2.680.000
8	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	2 unit	12.938.000
9	PERSONAL KOMPUTER	12 unit	126.563.750
10	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	12 unit	43.161.000
<b>Jumlah</b>			<b>322.299.731</b>

Transfer Masuk senilai Rp28.940.050 berupa Mesin Absensi senilai Rp7.990.000 sebanyak 1 unit dan Lap Top senilai Rp20.950.050 sebanyak 1 unit.

BNNP DIY mencatat reklasifikasi masuk yaitu Rak Besi menjadi Filling Cabinet sebanyak 2 unit. Total nilai reklasifikasi sebesar Rp19.800.000.

Mutasi kurang:

Penghentian Aset dari Penggunaan/Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya/ Aset Tetap yang tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah Rp121.569.043.

Reklasifikasi keluar berupa Rak Besi senilai Rp19.800.000 sebanyak 2 unit.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp5.348.464.000

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5.348.464.000 dan Rp5.200.740.000.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023*

*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	<b>5.200.740.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	147.724.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	0
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>5.348.464.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(687.323.493)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>4.661.140.507</b>

Saldo Awal Tahun Anggaran Yang Lalu Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan senilai Rp 5.200.740.000.

Mutasi tambah senilai Rp147.724.000 merupakan aset tetap gedung dan bangunan berupa pos security dan ruang seksi pemberantasan milik BNN Kabupaten Bantul.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 desember 2023 senilai Rp 687.323.493.

Nilai Buku setelah mutasi tambah dan akumulasi penyusutan senilai 4.661.140.507.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp301.843.000

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Dalam hal ini, aset tetap lainnya di wilayah BNNP DIY terdiri dari aset tetap lainnya di BNN

Kota Yogyakarta berupa penambahan nilai Gedung dan Bangunan pinjaman dari Gedung Keuangan Negara sebesar Rp286.843.000 berupa sekat ruang kantor, toilet, dan kanopi tempat parkir. Selain itu, aset tetap lainnya dari satker BNNP DIY berupa alat musik modern senilai Rp15.000.000. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp301.843.000 dan Rp301.843.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

*Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya*

*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	<b>301.843.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>301.843.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(13.125.001)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>288.717.999</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp16.761.925.381*

**C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.761.925.381 dan Rp15.778.580.492.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(dalam rupiah)*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	17.796.351.272	16.061.476.887	1.734.874.385
2	Gedung dan Bangunan	5.348.464.000	687.323.493	4.661.140.507
4	Aset Tetap Lainnya	301.843.000	13.125.001	288.717.999
	<b>Jumlah</b>	<b>23.446.658.272</b>	<b>16.761.925.381</b>	<b>6.684.732.891</b>

*Aset Lainnya  
Rp36.200.000*

**C.4. Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp36.200.000 dan Rp50.680.000.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada wilayah BNNP DIY terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

*Aset Tak Berwujud  
Rp277.638.000*

**C.4.1. Aset Tak Berwujud**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp277.638.000 dan Rp277.638.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY antara lain:

1. Satu aplikasi Software Komputer SIRENA (Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba);
2. Lisensi Microsoft Office 2016.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023  
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Nilai
1.	Software	132.838.000
2.	Lisensi Microsoft Office 2016	144.800.000
	<b>Jumlah</b>	<b>277.638.000</b>

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	<b>247.638.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>277.638.000</b>
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(241.438.000)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>36.200.000</b>

Aset Lain-Lain  
Rp74.861.963

**C.4.2. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp74.861.963 dan Rp29.191.000. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BNNP DIY dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN yang dibatasi penggunaannya. Aset Lain-lain di wilayah BNNP DIY berasal dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan seperti alat penghancur kertas, mesin absensi, camera digital, dll.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022</b>	<b>29.191.000</b>
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	121.569.043
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0
Penghapusan BMN	(75.898.080)
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>74.861.963</b>
Akumulasi Penyusutan	(74.861.963)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp316.299.963

**C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp316.299.963 dan Rp256.149.000. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset  
Lainnya TA 2023*

*(dalam rupiah)*

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
<b>A.</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>			
1	Software	132.838.000	132.838.000	0
2	Lisensi	144.800.000	108.600.000	36.200,000
	<b>Jumlah</b>	<b>277.638.000</b>	<b>241.438.000</b>	<b>36.200.000</b>
<b>B.</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>74.861.963</b>	<b>74.861.963</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>352.499.000</b>	<b>316.299.963</b>	<b>36.200.000</b>
	<b>Total</b>	<b>352.499.000</b>	<b>316.299.963</b>	<b>36.200.000</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban  
Jangka Pendek  
Rp36.331.416*

### **C.5. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek BNNP DIY per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp36.331.416 dan Rp37.274.904.

*Uang Muka dari  
KPPN Rp0*

#### **C.5.1. Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp36.331.416*

#### **C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga**

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp36.331.416 dan Rp37.274.904. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BNNP DIY per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang kepada Pihak Ketiga	36.331.416	Tagihan Langganan Internet, Telepon, Air, dan Listrik
<b>Total</b>		<b>36.331.416</b>	

Utang kepada Pihak Ketiga	Jumlah	Penjelasan
BNNP DIY	21.173.633	Tagihan Langganan Internet, Telepon, Air, dan Listrik
BNNK YOGYA	5.196.909	Tagihan Langganan Telepon dan Listrik
BNNK SLEMAN	8.943.557	Tagihan Langganan Internet, Telepon, Air, dan Listrik
BNNK BANTUL	1.017.317	Tagihan Langganan Internet/Telepon
<b>Total</b>	<b>36.331.416</b>	

Ekuitas

Rp6.922.630.051

**C.7 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp6.922.630.051 dan Rp7.537.618.536. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp170.810.000

**PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp170.810.000 dan Rp100.050.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan Jasa (SKHPN)	170.810.000	100.050.000	170
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>170.810.000</b>	<b>100.050.000</b>	<b>170</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY berasal dari Pendapatan hasil penerbitan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika)

pada satuan kerja BNNP DIY, BNNK Bantul, dan BNNK Sleman.

*Beban Pegawai*  
Rp8.098.327.137

### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.098.327.137 dan Rp7.259.317.284. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
Beban Gaji	6.561.499.651	4,964,492,840	132
Beban Tunjangan-tunjangan	1.536.827.486	2,302,714,036	66
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0
Pengembalian Beban gaji dan Tunjangan	0	7,889,592	-
<b>Jumlah Beban</b>	<b>8.098.327.137</b>	<b>7,259,317,284</b>	<b>111</b>

*Beban Persediaan*  
Rp399.636.447

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp399.636.447 dan Rp487.217.560. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	390.830.215	474.868.748	82
Beban Persediaan Amunisi	8.806.232	12.348.812	71
<b>Jumlah Beban</b>	<b>399.636.447</b>	<b>487.217.560</b>	<b>82</b>

*Beban Barang dan Jasa  
Rp5.806.966.657*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.806.966.657 dan Rp5.634.146.826. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa yang disebabkan peningkatan beberapa pos beban.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2023	31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.136.637.244	2.085.983.588	102%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	14.098.000	14.117.000	100%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.585.000	3.884.500	67%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	465.755.000	425.692.000	109%
Beban Barang Operasional Lainnya	117.770.000	80.128.000	147%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	34.506.930	0%
Beban Bahan	617.704.713	621.656.400	99%
Beban Honor Output Kegiatan	86.325.000	77.400.000	112%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	350.181.700	473.992.392	74%
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2.650.000	
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	9.356.800		
Beban Langganan Listrik	290.471.550	269.389.881	108%
Beban Langganan Telepon	54.028.135	41.772.091	129%
Beban Langganan Air	4.814.750	4.127.250	117%
Beban Langganan Daya dan Jasa	221.421.200	88.324.064	251%
Beban Sewa	753.871.067	751.600.000	100%
Beban Jasa Profesi	318.165.000	351.600.000	90%
Beban Jasa Lainnya	363.781.498	307.322.730	118%
<b>Jumlah</b>	<b>5.806.966.657</b>	<b>5.634.146.826</b>	<b>103%</b>
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0.00
<b>Total</b>	<b>5.806.966.657</b>	<b>5.634.146.826</b>	<b>103%</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp950.000.650*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp950.000.650 dan Rp958.412.021. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	344.796.637	309,819,918	111%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	599.204.013	641,183,013	93%
Beban Pemeliharaan Jaringan	6.000.000	0	
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	7,409,090	0%
<b>Jumlah Beban</b>	<b>950.000.650</b>	<b>958,412,021</b>	<b>99%</b>

Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp1.952.299.0  
71

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing - masing sebesar Rp1.952.299.071 dan Rp2.032.505.538. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	562.312.071	434.022.718	29,56
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	633.125.000	771.700.000	(17,96)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	750.129.600	815.847.620	(8,06)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.732.400	14.835.200	(54,62)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.952.299.071</b>	<b>2.036.405.538</b>	<b>(4,13)</b>
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	-	(3.900.000)	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.952.299.071</b>	<b>2.040.305.538</b>	<b>(4,31)</b>

Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
Kepada  
Masyarakat Rp0

**D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp24.000.000. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban

Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 DES 2023	30 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	15.000.000	(100,00)
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	9.000.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>(100,00)</b>

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.111.537.664*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.111.537.664 dan Rp1.320.055.987. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	985.909.462	1,192,635,025	83%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	107.398.202	105,440,962	102%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3,750,000	3,750,000	100%
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1,097.057.664</b>	<b>1,301,825,987</b>	<b>84%</b>
Beban Amortisasi Software	0	3,750,000	-
Beban Amortisasi Lisensi	14,480,000	14,480,000	100%
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>14,480,000</b>	18,230,000	79%
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.111.537.664</b>	<b>1,320,055,987</b>	<b>84%</b>

*Kegiatan Non Operasional  
(Rp 4.256.302)*

**D.11 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah masing – masing sebesar (Rp 4.256.302) dan (Rp 26.671.765)

Rincian Kegiatan Non Operasional  
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1.661.010	2.712.886	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-5.917.312	-29.384.651	<b>0,00</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>-4.256.302</b>	<b>-26.671.765</b>	<b>(84,04)</b>

Defisit Kegiatan Non Operasional merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp7.537.618.536*

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.537.618.536 dan Rp8.492.957.990.

*Defisit LO  
Rp18.152.213.928*

### **E.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp18.152.213.928 dan Rp17.642.276.981. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi  
Rp0*

### **E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp0*

#### **E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan  
Rp0*

#### **E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp3.080.000. Koreksi Nilai Persediaan tahun 2022 di BNNP DIY berasal dari notisi hasil audit berupa saldo awal teskit narkoba sebanyak 28 unit.

*Selisih Revaluasi Aset  
Rp0*

#### **E.4.3. Selisih Revaluasi Aset**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi  
Rp0*

#### **E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp5.250.000.

Koreksi di tahun 2022 berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya berupa peralatan dan mesin.

*Koreksi Lain-lain*  
Rp0

#### **E.4.5. Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023*

<b>Jenis Koreksi</b>	<b>Jumlah</b>
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

*Transaksi Antar Entitas*  
Rp17.537.225.443

#### **E.5. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp17.537.225.443 dan Rp16.689.107.527.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

##### *Transaksi Antar Entitas TA 2023*

<b>Jenis Persediaan</b>	<b>Koreksi</b>
Diterima dari Entitas Lain	(179.003.698)
Ditagihkan ke Entitas Lain	17.676.635.359
Transfer Masuk	39.593.782
Transfer Keluar	(0)
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>17.537.225.443</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### **E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp179.003.698 sedangkan DKEL sebesar Rp17.676.635.359.

#### **E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp39.593.782 terdiri dari:

##### *Transfer Masuk TA 2023*

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	Puslitdatin BNN	13.093.782
2.	Peralatan dan Mesin	Settama BNN	7.990.000
3.	Amunisi	Settama BNN	18.510.000
<b>Jumlah</b>			<b>39.593.782</b>

Transfer masuk ke BNN Kota Yogyakarta berupa satu buah mesin absensi dari Biro Umum Settama BNN senilai Rp7.990.000 dan satu unit Laptop Lenovo ThinkPad X13 dari Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN senilai Rp20.950.050 dikurangi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Laptop Lenovo minus Rp7.856.268.

Transfer masuk ke BNN Provinsi DIY berupa amunisi senilai Rp18.510.000 dari Sekretariat Utama BNN.

#### **E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Pengesahan Hibah Langsung TA 2023*

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
			0
<b>Total Pengesahan</b>			<b>0</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp6.922.630.051*

**E.6. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.922.630.051 dan Rp7.537.618.536.

**F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

**F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal pelaporan.

**F.1 Pengungkapan Lain-lain**

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY berdomisili di Jl. Brigjen Katamso, Komplek Perkantoran Selatan Purawisata, Yogyakarta;
2. Status tanah yang ditempati oleh gedung BNNP DIY adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi DIY;
3. Keberadaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) yang mana menyebutkan bahwa BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal;
4. BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
5. Hubungan antara BNN dengan BNNP yang sebelumnya bersifat koordinasi telah berubah menjadi instansi vertikal, yang mana BNN sebagai instansi induk selalu memberikan bimbingan dalam upaya P4GN;
6. Rekening Pemerintah yang digunakan :
  - a. Rekening Bendahara Pengeluaran BNNP DIY
    - Nomor Rekening : 651006824941000
    - Atas Nama : BPG 030 BNNP DIY
    - Nama Bank : BRI KCP Katamso
    - Saldo 31 Des 23 : Rp0
    - (Rekening koran per 31 Desember 2023 terlampir)

- b. Rekening Bendahara Pengeluaran BNNK Sleman
  - Nomor Rekening : 650900402561000
  - Atas Nama : BP BNNK Sleman
  - Nama Bank : BRI KCP Sleman
  - Saldo 31 Des 23 : Rp0
  - (Rekening koran per 31 Desember 2023 terlampir)
- c. Rekening Bendahara Pengeluaran BNN Kota Yogyakarta
  - Nomor Rekening : 00000245-01-001122-30-04
  - Atas Nama : BPG 030 BNNK Yogyakarta
  - Nama Bank : BRI KCP Katamso
  - Saldo 31 Des 23 : Rp0
  - (Rekening koran per 31 Desember 2023 terlampir)
- d. Rekening Bendahara Pengeluaran BNN Kabupaten Bantul
  - Nomor Rekening : 650900401731000
  - Atas Nama : BPG 030 BNN Kab Bantul
  - Nama Bank : BRI KC Bantul
  - Saldo 31 Des 23 : Rp0
  - (Rekening koran per 31 Desember 2023 terlampir)